

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Amir M.S. 1997. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Amir M.S. 2011. *Pewarisan Harta Pusako Tingi Dan Pencapaian Minangkabau*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Boedi Harsono. 2005. *Sengketa-Sengketa Tanah Serta Penanggulangnya*. Jakarta: Djambatan.
- Burhan Ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firman Hasan. 1988. *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Helmy Panuh. 2012. *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurnia Warman. 2012. *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*. Universitas Andalas.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI. 2016. *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Maria S.W. Sumardjono Dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurmaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Jakarta: Alumni.

Soerjono Soekanto. 1978. *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni.

Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti Adi Nugroho. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Suyud Margono. 2000. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tolub Setiadi. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfa Beta

Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

C. Jurnal

Erasmus Cahyadi, 2015, "Beberapa Catatan Atas Peraturan MATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2015", Digest Epistema (Berkala Isu Hukum Dan Keadilan Sosial), Volume 5/2015 Dan Volume 6/2016, Jakarta. Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2020 Pukul 20.00 Wib.

Maria SW Sumardjono. 2016. Ihwal Hak Komunal Atas Tanah. Digest Epistema Berkala Isu Hukum Dan Keadilan Eko-Sosial Vol 16 Hlm. 5. Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2020 Pukul 20.30 Wib.

Mira Novara Ardani. 2019. Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. Jurnal Gema Keadilan Volume 6 Edisi III. Diakses Pada Tanggal 19 September 2020 Pukul 19.00 Wib.

